

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Pernyataan ini terbukti dengan adanya krisis moneter di tahun 1998, dalam usahanya untuk meminimalisir atau memperkecil dampak negatif dari krisis ekonomi tersebut pemerintah mengandalkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Riawan dan Kusnawan, 2018). Hal ini karena UMKM mampu menghadapi terpaan ekonomi dan tidak mengalami keterpurukan karena beberapa alasan usaha kecil memproduksi barang konsumsi yang relatif tidak bertahan lama. Golongan barang ini dicirikan oleh permintaan terhadap perubahan pendapatan relatif rendah. Artinya jika terjadi peningkatan pendapatan masyarakat permintaan akan barang tersebut tidak akan meningkat, jika pendapatan masyarakat menurun pun permintaan juga akan relatif tetap. Dengan demikian rata-rata kemuduran usaha kecil tidak separah seperti yang dialami oleh usaha besar (Basri, 2002:210).

Salah satu sektor yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional adalah UMKM yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar golongan pendapatan dan juga antar pelaku usaha. Pengembangan UMKM juga mampu memperluas basis ekonomi dan bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Minusu, 2010). Saat ini perkembangan

UMKM di Indonesia semakin pesat, hal ini bisa dilihat dengan semakin banyaknya UMKM dilansir dari data yang dirilis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Tabel jumlah UMKM di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	62.922.617	64.194.057

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa unit usaha yang ada di Indonesia di dominasi oleh UMKM, dan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin bertambah. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus Bambang Tri Waluyo menyatakan bahwa di Kabupaten Kudus sendiri jumlah UMKM semakin meningkat.

**Tabel 1.2**  
**Tabel jumlah UMKM di Kabupaten Kudus**

<b>Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	13.600	14.511

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus

UMKM yang berkembang di Kudus sangat banyak dan bervariasi seperti konveksi, batik, bordir, tas, sepatu, makanan olahan, kecap, sirup, pisau, boneka, hingga spare part kendaraan dan lainnya.

Permasalahan pendapatan usaha di sektor UMKM di Kabupaten Kudus adalah dengan pesatnya pertumbuhan Industri UMKM yang tidak diimbangi dengan permodalan yang memadai, di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 hingga

2018 prosentase permodalan masih belum memenuhi target dan juga kenaikan omset UMKM, Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus prosentase kenaikan omset UMKM ditahun 2018 yang ditargetkan sebesar 12% hanya terealisasi sebesar 10%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha UMKM antara lain modal sendiri, KUR (Kredit Usaha Rakyat), jam kerja, dan lama usaha. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi pendapatan UMKM adalah modal sendiri. Salah satu dasar dalam membangun usaha adalah permodalan yang pada umumnya menjadi kendala. Menjalankan suatu usaha membutuhkan modal secara berkelanjutan untuk mengembangkan usahanya dan untuk melakukan kegiatan operasional untuk memperoleh hasil penjualan, hal ini dibuktikan dalam Penelitian Riawan dan Kusnawan (2018), Magfira (2018), yang hasilnya modal sendiri berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha.

Faktor kedua yaitu KUR yang diberikan oleh bank umum dan bank daerah. KUR adalah sebuah skema pembiayaan pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha, dan kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan yang cukup (wikipedia.org). dikutip dari (<http://www.bank-bri-bca-mandiri>) program KUR ini dibuat pemerintah dengan skema penyaluran bantuan pinjaman modal berbunga ringan untuk masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang dananya 100% dari bank pelaksana KUR untuk rakyat Indonesia yang produktif dan layak dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah melalui PT.

Askrindo dan Perum Jamkrindo. Karena dananya dari bank pelaksana, maka bunga dan sistem yang digunakan berbeda beda. Bank pelaksana KUR sendiri yaitu bank yang turut menandatangani nota kesepahaman bersama tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Berdasarkan penelitian Riawan dan Kusnawan (2018) dan juga penelitian Saragih, dkk (2014) membuktikan bahwa KUR berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha. Pemerintah mulai mencanangkan program KUR pada tahun 2007 sebagai respon atas instruksi presiden no. 6 tahun 2007 agar penyaluran kredit dapat merata. Menurut Sudrajat (2018) penyaluran dana KUR dilakukan oleh pemerintah dengan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Namun KUR yang dicanangkan oleh pemerintah ini sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank yang ditunjuk. Program KUR ini diharapkan sangat membantu para pengusaha mikro kecil menengah dalam melakukan pengembangan usaha mereka.

Faktor ketiga adalah jam kerja, Setiawan (2006:4) menyatakan bahwa seorang pekerja tidak dapat diharapkan untuk melakukan pekerjaan sehari penuh. Untuk memenuhi permintaan pasar, industri atau perusahaan perlu memperhatikan jam kerja para karyawan untuk mendapatkan hasil produksi sesuai dengan yang di rencanakan agar pendapatan perusahaan semakin meningkat. dalam penelitian Rasmusi dan Magfira (2018) dan juga penelitian Jafar dan Firdaus (2012) membuktikan bahwa ada hubungan langsung antara jam kerja dengan tingkat pendapatan dan setiap penambahan waktu operasi akan membuka

peluang bertambahnya omzed penjualan. melakukan penelitian terhadap jam kerja yang hasilnya positif dan terhadap pendapatan usaha. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan “jam kerja yaitu tujuh jam kerja dalam satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu”.

Faktor keempat yaitu lama usaha menurut Sukirno (1994) lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku. Penelitian Furqon (2018) menyatakan bahwa lama usaha berpengaruh positif, penelitian Husaini dan Fadhlani (2017) juga menyatakan bahwa lama usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha.

Penelitian tentang pendapatan usaha di UMKM sudah banyak dilakukan akan tetapi hasilnya yang tidak konsisten maka diperlukan penelitian kembali. Penelitian ini mereplikasikan penelitian yang dilakukan oleh Riawan dan Kusnawan (2018) yaitu objek penelitiannya Pada UMKM di Desa Platihan Kidul Kecamatan Siman. Mengacu pada penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riawan dan Kusnawan (2018) yaitu dengan penambahan variabel independen antara lain jam kerja dan lama usaha. Alasannya karena dalam dalam suatu usaha jumlah jam kerja sangat mempengaruhi output dan laba suatu usaha, dan juga semakin lamanya suatu usaha berjalan maka pengusaha akan memiliki lebih banyak pengalaman usaha dibandingkan dengan pengusaha yang baru. Perbedaan yang kedua adalah lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH MODAL SENDIRI, KREDIT USAHA RAKYAT, JAM KERJA DAN LAMA USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA (Studi pada UMKM di Kabupaten Kudus Tahun 2019)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu bahasan masalah. Adapun ruang lingkup masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Objek penelitian ini difokuskan pada perusahaan UMKM di Kabupaten Kudus.
2. Variabel dependen yaitu pendapatan usaha.
3. Variabel independen yaitu modal sendiri, kredit usaha rakyat, jam kerja dan lama usaha.

Jadi ruang lingkup penelitian ini dibuat agar pokok permasalahan lebih terfokus dan tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, maka penelitian ini hanya akan membahas pada masalah modal sendiri, kredit usaha rakyat, jam kerja dan lama usaha terhadap pendapatan usaha.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan usaha UMKM di Kabupaten Kudus?
2. Apa pengaruh KUR terhadap pendapatan usaha UMKM di Kabupaten Kudus?
3. Apa pengaruh jam kerja terhadap pendapatan usaha UMKM di Kabupaten Kudus?
4. Apa pengaruh lama usaha terhadap pendapatan usaha UMKM di Kabupaten Kudus?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan usaha UMKM di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui pengaruh kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pendapatan usaha UMKM di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja terhadap pendapatan usaha UMKM di Kabupaten Kudus.
4. Untuk mengetahui pengaruh lama usaha terhadap pendapatan usaha UMKM di Kabupaten Kudus.

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait pelaksanaan KUR dan menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan usaha mikro dan menambah pengetahuan ilmu mengenai pendapatan usaha mikro.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengusaha mikro dan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. Bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.
3. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama menjalani perkuliahan.
4. Bagi UMKM, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang bermanfaat untuk pelaku UMKM untuk pertimbangan penggunaan modal sendiri, modal KUR dan juga evaluasi terhadap pendapatan usaha.